

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Semenjak keputusan kabinet pemerintahan Shinzo Abe tahun 2014,<sup>1</sup> Jepang tengah dilanda ketegangan yang disebabkan oleh wacana revisi Artikel 9. Artikel 9 adalah klausul dari konstitusi unik milik Jepang yang mengatur tentang pertahanan Jepang, yang berisi pernyataan dari bangsa Jepang akan prinsip penolakan perang sebagai cara menyelesaikan konflik internasional. Artikel 9 sendiri merupakan bagian dari konstitusi buatan Amerika Serikat yang diajukan sebagai pengganti konstitusi buatan Shogun, hal ini disebabkan kekhawatiran kembalinya berkuasa Shogun sebagai pemimpin negara yang bisa berujung pada kembalinya Jepang menjadi negara yang suka berperang. Berikut ini merupakan redaksional lengkap dari Artikel 9 sebagaimana tercatat dalam konstitusi Jepang:

*"Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. (2) To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized."*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Cabinet Decisions and Other Announcements*, artikel japan kantei, diakses dalam [http://japan.kantei.go.jp/96\\_abe/decisions/](http://japan.kantei.go.jp/96_abe/decisions/), (11/04/2017, 10:32 WIB)

<sup>2</sup> *The Constitution of Japan*, artikel japan kantei, diakses dalam [http://japan.kantei.go.jp/constitution\\_and\\_government\\_of\\_japan/constitution\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html), (08/04/2016, 22:59 WIB)

Berdasarkan redaksional lengkap Artikel 9 diatas juga disebutkan bahwa dalam mencapai tujuan dari pasal pertama, pasukan pertahanan untuk wilayah darat, laut dan udara tidak dibuat, dan hak bagi Jepang untuk menyatakan perang tidak berlaku. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia II, konstitusi milik Jepang digantikan dengan konstitusi hasil pemikiran Sekutu dan Amerika Serikat yang mana di dalamnya terdapat perubahan fundamental terhadap sistem politik Jepang, yaitu pasal 9 berisi pernyataan Jepang tentang penolakan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional, dan hak untuk menggunakan kekuatan pertahanan negaranya terkecuali Jepang diserang terlebih dahulu oleh musuh. Disahkannya konstitusi yang berisi artikel 9 ini membuat Jepang dikenal sebagai satu dari sebagian kecil negara yang menganut pasifisme.<sup>3</sup> Meskipun demikian, Jepang tetap memiliki apa yang disebut dengan Pasukan Pertahanan Diri (*Self Defense Force*, selanjutnya disebut SDF) atau *jieitai*. Berbeda dengan pasukan militer pada umumnya, Pasukan Pertahanan Diri Jepang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari luar dan hanya beroperasi dengan justifikasi pertahanan diri.

Prinsip pasifisme yang dianut oleh Jepang ini telah diterapkan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Akan tetapi, baru-baru ini prinsip tersebut mulai ditinggalkan. Hal ini tampak ketika Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang yang

---

<sup>3</sup> History of Japan's Pacifism, diakses dalam <http://www.mtholyoke.edu/~marca20m/classweb/history.html>, (06/01/17, 19:21 WIB)

menjabat kembali sejak 2012 memutuskan bahwa Jepang harus melakukan revisi Artikel 9. Berhubungan dengan upaya berkelanjutannya untuk merevisi artikel 9, Shinzo Abe menyatakan bahwa secara umum tidak ada yang berubah tentang ketentuan bahwa SDF tidak akan berpartisipasi dalam konflik bersenjata di luar Jepang<sup>4</sup>, hanya saja pemerintah akan mengambil interpretasi berbeda yang lebih fleksibel. Apabila berhasil dilakukan, SDF Jepang akan memiliki wewenang untuk memberi bantuan kepada para aliansi yang tengah berperang di luar negeri atau diserang oleh musuh di mana jika bantuan tidak diberikan akan ikut mempengaruhi keamanan dalam negeri Jepang.<sup>5</sup> Pada sisi lain, Jepang akan mampu memenuhi tuntutan Amerika Serikat untuk ikut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia yang telah ada semenjak Perang Dingin ketika pasukan Amerika Serikat harus meninggalkan Jepang demi memperkuat pertahanan di Korea Selatan dan meminta Jepang untuk membentuk *Police National Reserve* yang dalam perkembangannya menjadi SDF, yaitu memiliki kekuatan militer sendiri dan menjadi aliansi penyeimbang kekuatan China dan Korea Utara di kawasan Asia Timur.<sup>6</sup>

Meskipun orang nomor satu di Jepang tersebut terus meyakinkan bahwa Jepang tidak akan terseret perang-perang Amerika Serikat, mayoritas dari masyarakat

---

<sup>4</sup> Linda Sieg and Kiyoshi Takenaka, *Japan Takes Historic Step from Post-war Pacifism, OKs Fighting For Allies*, diakses dalam <http://www.reuters.com/article/us-japan-defense-idUSKBN0F52S120140702>, (28/3/2016, 19:00 WIB)

<sup>5</sup> Erik Slavin, *Japan Enacts Major Changes to Its Self-Defense Laws*, diakses dalam <http://www.stripes.com/news/pacific/japan-enacts-major-changes-to-its-self-defense-laws-1.368783>, (24/4/2016, 17:05 WIB)

<sup>6</sup> Nakashima and Takuma, *Building the Japan-US Alliance, 1951–72: A Diplomatic Reassessment*, diakses dalam <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2016/building-japan-us-alliance>, (08/01/2017, 22:27 WIB)

Jepang tetap menolak pengesahan perubahan interpretasi Artikel 9. Mereka takut akan kembalinya Jepang menjadi negara yang militeristik dan otoriter, juga kemungkinan akan generasi yang akan datang yang harus pergi berperang. Bahkan aksi pembakaran diri yang dilakukan oleh seorang laki-laki Jepang di tengah aksi protes terhadap Abe di Shinjuku tidaklah cukup untuk membuat Abe mundur.<sup>7</sup> Selagi protes dalam negeri berkecamuk, negara-negara tetangga yang selalu memandang Jepang dengan label penjajah perang ikut menyerukan kritikan akan reinterpretasi yang dilakukan Jepang sebagai kembalinya Jepang menjadi negara yang agresif secara militer.<sup>8</sup>

Salah satu syarat sebuah konstitusi agar dapat direvisi, haruslah didukung oleh dua pertiga anggota dari tiap *chamber diet*<sup>9</sup> dan harus disetujui oleh mayoritas suara di referendum.<sup>10</sup> Kompleksitas kondisi domestik dan adanya kemungkinan suara mayoritas saat referendum tidak berpihak pada keputusannya, membuat Abe memilih untuk melakukan ‘reinterpretasi’<sup>11</sup> dibanding harus melalui prosedur amandemen

---

<sup>7</sup>Jeff Kingston, *Shinjuku Self-immolation Act Protests Abe's Democracy Hijack*, diakses dalam <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/07/05/commentary/shinjuku-self-immolation-act-protests-abes-democracy-hijack/#.VwfOavI97IX> (28/3/2016, 22:32 WIB)

<sup>8</sup> Ju-min Park and Jack Kim, *South Korea Cautions Japan on Easing Military Limits*, diakses dalam <http://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-idUSKBN0F63U820140701?mod=related&channelName=worldNews>, (23/4/2016, 18:03 WIB)

<sup>9</sup> *Chamber* atau Parlemen Jepang yang terdiri dari dua Majelis, yaitu Majelis Rendah dan Majelis Tinggi di mana keduanya berperan dalam perundang-undangan dan penunjukan Perdana Menteri, diakses dalam <http://web-japan.org/kidsweb/explore/government/q2.html>, (13/09/2016, 13:25)

<sup>10</sup> Kyodo, *Abe Explicit In Call for Amendment to Constitution's Article 9*, diakses dalam <http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/03/national/politics-diplomacy/abe-explicit-call-amendment-constitutions-article-9/#.VwfPyPI97IV>, (28/3/2016, 22:43 WIB)

<sup>11</sup> Reinterpretasi, yaitu penafsiran ulang akan makna dari penafsiran sebelumnya, diakses dalam <http://kbbi.web.id/reinterpretasi>, (13/09/2016, 13:37)

yang sah.<sup>12</sup> Para akademisi dan pengamat hukum menilai tindakan Abe, yang sudah mendapatkan dua pertiga suara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, sebagai inkonstitusional. Masyarakat Jepang juga merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan Shinzo Abe sebagai pembenaran melakukan reinterpretasi. Guna mengantisipasi hal ini, Abe berencana menggunakan isu upaya amandemen konstitusi sebagai topik dalam kampanyenya di pemilihan umum Majelis Tinggi musim panas tahun 2016 sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang hal tersebut. Shinzo Abe menyatakan *“I’ll firmly appeal to the public over the matter during the House of Councillors election. I’d like to deepen national debate on the issue.”*<sup>13</sup> Kendati demikian, pada bulan Juli 2016, Shinzo Abe justru mengampanyekan tentang Abenomics, seolah menghindari topik tentang upayanya merevisi Artikel 9.<sup>14</sup>

Kegigihan Shinzo Abe yang tentunya dipengaruhi persepsi yang dianutnya meskipun diterpa banyak kontra dari dalam dan luar negeri tentunya akan memberikan pengaruh terhadap reinterpretasi Artikel 9. Hal ini yang membuat penulis ingin meneliti pengaruh persepsi Shinzo Abe terhadap reinterpretasi artikel 9.

---

<sup>12</sup> Stephen Harner, *Abe’s Objectives In Reinterpreting Japan’s Peace Constitution*, diakses dalam <http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/abes-objectives-in-reinterpreting-japans-peace-constitution/>, (23/4/2016, 18:37 WIB)

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Flurina Rei, *The Upper House Election in Japan: “Teflon Abe” Did It Again*, diakses dalam <http://www.jetdencre.ch/the-upper-house-election-in-japan-teflon-abe-did-it-again>, (13/05/2017, 20:13 WIB)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa persepsi Shinzo Abe berpengaruh terhadap reinterpretasi artikel 9 konstitusi Jepang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menilik kembali pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui pengaruh persepsi Shinzo Abe terhadap reinterpretasi artikel 9 konstitusi Jepang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini, yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang terdapat dari penelitian ini antara lain berupaya menjelaskan “Pengaruh Persepsi Shinzo Abe Terhadap Reinterpretasi Artikel 9 Jepang”, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis penelitian ini yaitu penulis berharap agar penelitian ini bisa menjadi kontribusi untuk kajian Jepang dalam ranah studi Hubungan Internasional, khususnya yang memiliki kaitan dengan Artikel 9 Jepang.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis, seperti penelitian oleh Saiful Milah, Risco Valentino, Dicky Kurniawan, Mirani Rezkia, dan Christopher W. Hughes. Penelitian pertama ialah Skripsi yang ditulis oleh Saiful Milah yang berjudul “*Pengaruh Nuklir Korea Utara terhadap Prakarsa*

*Jepang Dalam Pembentukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan melalui GSOMIA*". Pada penelitiannya tersebut, Milah berupaya menjelaskan tentang program militer GSOMIA yang diusulkan Jepang kepada Korea Selatan sebagai tindakan yang didorong kesadarannya sebagai negara minim militer. Saiful Milah mencoba menjawab pertanyaan yang timbul yaitu apa motivasi yang mendorong Jepang membentuk GSOMIA. Melalui kerangka pemikiran yang menggunakan konsep *Security Dilemma* untuk menjelaskan kekhawatiran Jepang terhadap nuklir Korea Utara dan *Balance of Power* untuk menjelaskan upaya Jepang menimbun kekuatan melalui GSOMIA, Saiful Milah mendapatkan bahwa alasan Jepang melakukan kerjasama militer GSOMIA dengan Korea Selatan yaitu guna mengimbangi kekuatan Korea Utara yang memiliki nuklir sebagai hasil penelitian.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam hipotesanya, alasan Jepang melakukan tindakan yang berpengaruh terhadap militernya adalah dikarenakan sikap negara lain di regional yang sama yang mengancam keamanan Jepang, dan dianalisa melalui metode eksplanatif. Perbedaannya terletak pada teori yang dipakai, di mana Milah menggunakan konsep *Security Dilemma* dan *Balance of Power*, sementara penulis menggunakan teori persepsi Ole R. Holsti. Milah berfokus pada Jepang yang berinisiatif membuat kerjasama militer dengan Korea Selatan karena nuklir Korea Utara, di mana penulis berfokus pada persepsi Shinzo Abe yang merevisi artikel 9.

Kemudian penelitian oleh Risco Valentino berjudul "*Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Peningkatan Aliansi Jepang dan AS*", menjelaskan

meningkatnya intensitas kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat semenjak China meningkatkan anggaran belanja militer guna mencanggihkan pertahanannya, juga mencerminkan rasa terancam yang dirasakan Jepang. Risco Valentino berupaya mengangkat perkembangan aliansi militer Jepang-AS pada momentum modernisasi militer China. Menggunakan konsep Balance of Power dan teori Alliance dalam pendekatannya sebagai kacamata melihat permasalahan yang muncul dalam perkembangan China maupun hubungan Jepang-AS, didapatkan hasil penelitian yaitu aliansi dilakukan sebagai upaya merespon atau menandingi modernisasi China di segala bidang khususnya militer. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian eksplanatif, dan fokusnya pada kebijakan Jepang menghadapi sikap negara lain dengan upaya meningkatkan militernya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah konsep yang digunakan, antara lain Modernisasi dan *Alliance*.

Sementara itu, penelitian oleh Dicky Kurniawan berjudul “*Upaya Jepang Untuk Menjadi Negara Mandiri: Studi pada Kebijakan Yasuhiro Nakasone di Bidang Militer tahun 1982-1987*”, melakukan studi pada kebijakan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone yang pertama kali menyatakan keinginan untuk melakukan perubahan terhadap klausul anti-militer Jepang<sup>15</sup>. Upaya menggerakkan kembali Militer di Jepang selalu menimbulkan pro dan kontra, tidak terkecuali yang dilakukan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone, yang juga merupakan orang pertama yang

---

<sup>15</sup> Dicky, 2010, “*Upaya Jepang Untuk Menjadi Negara Mandiri: Studi pada Kebijakan Yasuhiro Nakasone di Bidang Militer tahun 1982-1987*”, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 8.



menyatakan keinginan mengubah konstitusi, membuat hal ini menarik untuk dikaji. Fokus dari penelitian Dicky Kurniawan adalah mencari tahu pengaruh kebijakan Yasuhiro Nakasone pada tahun 1982-1987 terhadap meningkatnya belanja militer yang memicu keinginan mengubah konstitusi agar Jepang menjadi negara mandiri. Konsep Decision Making Process digunakan untuk mengkaji posisi Yasuhiro Nakasone sebagai Perdana Menteri terhadap penentuan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor eksternal, dan konsep Balance of Power digunakan untuk menjelaskan upaya Yasuhiro Nakasone terhadap Artikel 9 adalah usaha meningkatkan kekuatan Jepang di dunia. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu meskipun usaha Yasuhiro Nakasone tidak menggoyahkan masyarakat Jepang dalam mempertahankan pasifismenya, tetapi prestasi yang telah tercapai yaitu upaya pemenuhan kebutuhan negara akan rasa aman dari pertarungan US dan AS. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian eksplanatif. Perbedaannya terletak pada fokus di mana Dicky Kurniawan memusatkan penelitiannya terhadap kebijakan PM Yasuhiro Nakasone sementara penelitian ini berfokus pada persepsi PM Shinzo Abe yang membuatnya merevisi Artikel 9 Jepang.

Penelitian berikutnya oleh Mirani Rezkie Rumatiga dengan judul “*Respon Jepang Terhadap Peluncuran Satelit Kwangmyongsong 3*”, menjelaskan respon Jepang akan uji coba satelit Korea Utara, Kwangmyongsong 3, yang menganggap ini merupakan uji coba IBCM. Fokus dari penelitian Mirani Rezkie Rumatiga adalah mencari tahu alasan dari respon Jepang terhadap peluncuran satelit

Kwangmyongsong 3 dengan menempatkan kapal perang di laut timur China dan laut Jepang. Teori *threat perception* digunakan untuk mengkaji bahwa pelajaran yang didapat di masa lalu oleh Jepang (peluncuran Taepodong 1 maupun 2) menjadi dasar respon peluncuran satelit Kwangmyongsong 3. Konsep *security dilemma* menjelaskan bahwa kepemilikan nuklir oleh Korea Utara dianggap berbahaya oleh dunia termasuk Jepang, ditambah sikap agresif Korea Utara menambah kegelisahan Jepang terhadap keamanannya. Didapatkan hasil penelitian yaitu pengiriman kapal penghancur bersistem Aegis dan penempatan PAC – 3 merupakan hal yang wajar karena persepsi keamanan Jepang terhadap Korea Utara dipengaruhi faktor-faktor seperti *history*, *belief* dan *information* dari masa lalu, selain itu Jepang juga merasakan dilema karena nuklir yang dimiliki Korea Utara dan peluncuran satelit Kwangmyongsong 3 memicu meningkatnya kegelisahan Jepang. Persamaan dengan penelitian ini yaitu fokusnya terletak pada respon Jepang terhadap dinamika keamanan regional, dan perbedaannya terletak pada teori dan konsep yang digunakan.

Penelitian terakhir dari Christopher W. Hughes berjudul “*Japan’s Foreign and Security Policy Under the ‘Abe Doctrine’ New Dynamism or New Dead End*”, menganalisa serta mengkritisi agenda-agenda kebijakan luar negeri dan keamanan dalam Agenda Abe, apa yang dicoba untuk dicapai melalui kebijakan-kebijakannya, kontradiksi yang terdapat di dalamnya, serta dampak yang akan dihasilkannya terhadap hubungan-hubungan bilateral dan keamanan Jepang sendiri. Kesimpulan yang didapat yaitu adalah salah bagi Jepang untuk mencoba menyelesaikan masalah keamanannya menggunakan pendekatan berupa revisionisme ideologi, yang jelas

akan memicu permasalahan dengan negara-negara di Asia Timur dan bahkan Amerika Serikat. Jepang yang tidak mampu mendapatkan kembali kepercayaan diri serta keamanan yang disebabkan oleh keagresifan Doktrin Abe tidak hanya dapat memicu ketegangan tapi dapat menghalangi Jepang dari mencapai apa yang Doktrin Abe janjikan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan luar negeri Jepang di bawah Shinzo Abe, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian di mana Christopher W. Hughes berfokus pada kebijakan-kebijakan yang dibuat Shinzo Abe sementara penulis berfokus pada persepsi Shinzo Abe dalam membuat kebijakan luar negeri, khususnya dalam melakukan reinterpretasi terhadap artikel 9.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Nomor	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil
1.	Pengaruh Nuklir Korea Utara terhadap Prakarsa Jepang Dalam Pembentukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan melalui GSOMIA. Oleh: Saiful Milah	Eksplanatif Konsep: Security Dilemma Balance of Power	Sebagai negara minim militer Jepang harus meningkatkan militernya dengan kerjasama bersama Korea Selatan melalui GSOMIA. Di dalamnya diatur bagaimana Jepang dan Korea Selatan memiliki intel militer dan bertukar informasi tentang nuklir Korea Utara atau senjata pemusnah massal-nya secara sistematis.
2.	Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Peningkatan Aliansi Jepang dan AS. Oleh: Risco Valentino	Eksplanatif Konsep: Modernisasi Alliance	Jepang yang merasa terancam dengan China yang terus menerus memodernisasi militernya meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Amerika melalui National Defense Program Guideline 2004. Meskipun dalam perkembangannya Jepang ingin memprioritaskan keberhasilan pertahanan nasionalnya sendiri.
3.	Upaya Jepang Untuk Menjadi Negara Mandiri:	Eksplanatif Konsep:	Meskipun usaha Nakasone dalam meningkatkan anggaran

	<p>Studi pada Kebijakan Yasuhiro Nakasone di Bidang Militer tahun 1982-1987.</p> <p>Oleh: Dicky Kurniawan</p>	<p>Decision Making Process</p> <p>Balance of Power</p>	<p>pertahanan Jepang yang didukung oleh Amerika melalui program MTDPE mengalami kendala dari dalam negeri, ia tetap berhasil memenuhi kebutuhan negara pada masa itu yakni rasa aman dari pertarungan dua superpower, Amerika dan Uni Soviet.</p>
4.	<p>Respon Jepang Terhadap Peluncuran Satelit Kwangmyongsong 3</p> <p>Oleh: Mirani Rezkia Rumatiga</p>	<p>Eksplanatif</p> <p>Teori: Threat Perceptions</p> <p>Konsep: Security Dilemma</p>	<p>Pengiriman kapal penghancur dengan sistem Aegis dan penempatan PAC – 3 merupakan hal yang wajar karena persepsi keamanan Jepang terhadap Korea Utara dipengaruhi faktor pengalaman dari masa lalu, kepemilikan nuklir Korea Utara dan peluncuran satelit Kwangmyongsong 3 memicu kewas-wasan Jepang.</p>
5.	<p>Japan's Foreign and Security Policy Under the 'Abe Doctrine' New Dynamism or New Dead End</p> <p>Oleh: Christopher W.</p>	<p>Metode: Eksplanatif</p> <p>Konsep: Revisionisme, Kebijakan luar negeri, &amp;</p>	<p>Jika Jepang masih bersikeras mempertahankan revisionisme radikal dari Doktrin Abe, hasil yang didapat melalui kebijakan luar negeri dan keamanan yang dipromosikan melalui Doktrin</p>

	Hughes	Keamanan Nasional.	Abe akan cenderung menjadi kebalikan dari apa yang diharapkan, yaitu Jepang yang dibayang-bayangi sosok China, ketidakpercayaan pada Amerika Serikat, dan keinginan kuat untuk memperjuangkan kebanggaan serta otonomi nasional. Hal ini menempatkan Jepang pada posisi yang sulit diprediksi dan hanya akan menimbulkan ketegangan yang mengancam hubungan bilateral serta keamanan Jepang sendiri.
6.	Pengaruh Persepsi Shinzo Abe Terhadap Reinterpretasi Artikel 9 Jepang Oleh: Pradipta Wahyu Garini	Eksplanatif Teori: Teori Persepsi Ole R. Holsti	Keputusan Jepang dalam melakukan reinterpretasi artikel 9 dipengaruhi oleh persepsi konservatif Shinzo Abe yang memandang bahwa keamanan di Asia Timur saat ini sangatlah tidak stabil, melihat eratis-nya sikap Korea Utara dengan nuklirnya, protes-protes dari Korea Selatan akan kebijakan kontroversial Abe, juga China dengan membumbungnya pilar

			<p>ekonomi dan militernya. Shinzo Abe juga berpandangan bahwa Jepang harus dan bisa mandiri secara militer, tidak mengandalkan Amerika untuk pertahanannya, juga sebagai wujud pemenuhan tuntutan Amerika terhadap Jepang untuk ikut berkontribusi dalam menjaga keamanan dunia. Untuk mengeliminasi rasa tidak aman akan kondisi regional dan demi kebaikan pertahanan Jepang sendiri, tindakan Abe melakukan reinterpretasi artikel 9 sangat diperlukan.</p>
--	--	--	--

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori persepsi yang dirumuskan oleh Ole R. Holsti.

### **1.6.1 Teori Persepsi Ole R. Holsti**

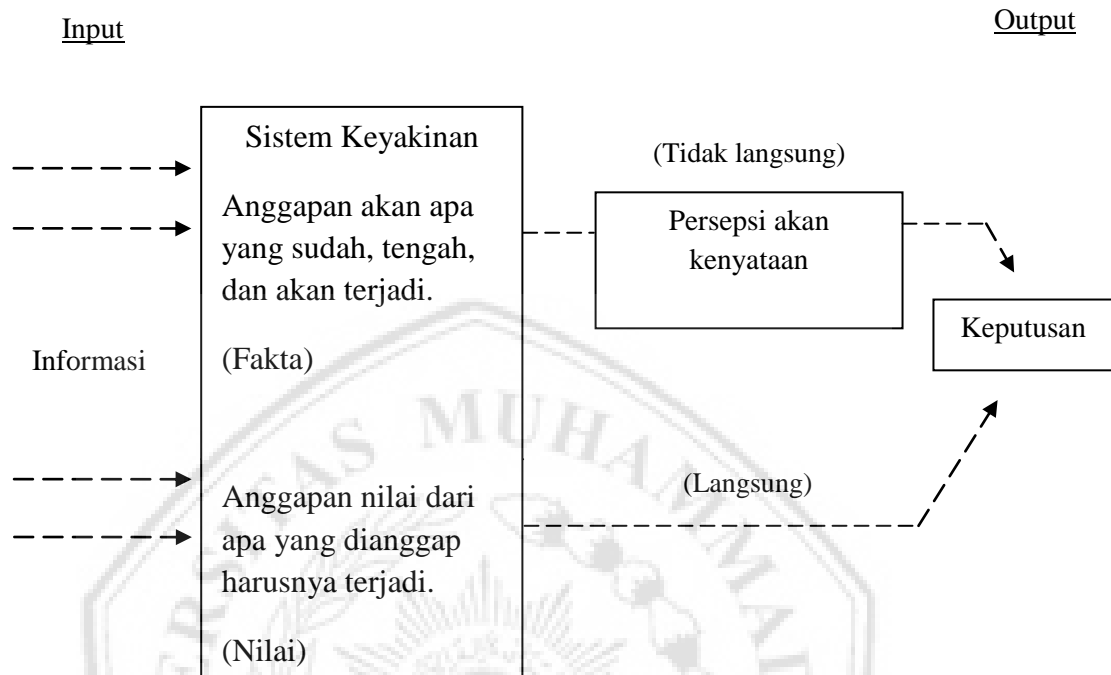
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori persepsi oleh Ole R. Holsti. Penulis akan menggunakan pendekatan mikro yaitu analisis terhadap individu pembuat kebijakan. Asumsinya, kebijakan yang diambil oleh sebuah negara tidak semata-mata merepresentasikan kepentingan negara itu sebagai suatu keseluruhan, akan tetapi dipengaruhi oleh persepsi dan nilai-nilai yang dianut oleh individu berkewenangan tertinggi dalam mengambil tindakan. Secara umum, teori persepsi Ole R. Holsti memetakan cara pandang seorang individu menjadi sistem keyakinan yang didorong oleh informasi dunia sekitar dan membentuk fakta berisi anggapan akan apa yang sudah, tengah, dan akan terjadi, serta nilai dari apa yang dianggap harusnya terjadi, hingga menjadi sebuah keputusan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ole R. Holsti, *The Belief System and National Images*, Department of Political Science, Vol, 6, No, 3, Stanford: Stanford University, hal. 245



### Bagan 1: Teori Persepsi Ole R. Holsti



Sumber: Ole R. Holsti, The Belief System and National Images<sup>17</sup>

Melalui bagan di atas, dapat dilihat hubungan antara sistem kepercayaan dan pengambilan keputusan, di mana seorang pengambil kebijakan bertindak berdasarkan persepsinya akan dunia, dan bukan berdasarkan realita yang objektif tentang dunia.<sup>18</sup> Negara tidak dapat membuat kebijakan luar negeri, melainkan individu pemegang kekuasaan tertinggi yang memanfaatkan kapasitas yang ada guna mencapai kepentingan dengan mengatasnamakan negara. Oleh sebab itu, nilai-nilai, sifat, pandangan, tingkah laku, bahkan ideologi dari individu berwenang adalah faktor yang

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

perlu dipelajari.<sup>19</sup> Melalui teori ini penulis bertujuan untuk menganalisa alasan Shinzo Abe melakukan reinterpretasi Artikel 9 yang dipengaruhi oleh persepsi dan sistem keyakinannya.

Melalui teori tersebut, penulis memiliki tujuan untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh Shinzo Abe sebagai wujud kebijakan Jepang, karena dengan melakukan reinterpretasi bahkan mengamandemen Artikel 9, maka hal itu mengubah perilaku atau sikap Jepang dalam urusan keamanan, yang tentunya akan berimbas pada peran Jepang dalam misi bersenjata luar negeri dari yang awalnya sekedar menggunakan *checkbook diplomacy*, dengan diamandemennya Artikel 9 dapat turun langsung ke lapangan dan bersanding dengan aliansi militernya di medan konflik.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban akan korelasi dua atau lebih variabel yang berangkat dari bentuk pertanyaan ‘mengapa’, yang meminta penjelasan sebuah teori.

### **1.7.2 Level Analisa**

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen atau unit analisa, dan variabel independen atau unit eksplanasi. Level analisa yang digunakan adalah reduksionis dengan Unit Analisa Reinterpretasi Artikel 9 Jepang dan Unit Eksplanasi Persepsi Shinzo Abe.

---

<sup>19</sup> Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, hal. 47

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka ini meliputi kajian literatur yang didapatkan dari berbagai sumber di internet maupun fisik/buku. Antara lain yaitu skripsi dan penelitian terdahulu, artikel, maupun situs akademis.

### **1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **a. Batasan Waktu**

Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu sejak 2014 pada saat Shinzo Abe melakukan reinterpretasi Artikel 9.

#### **b. Batasan Materi**

Adapun batasan materi dalam penelitian ini ialah pengaruh persepsi Shinzo Abe terhadap reinterpretasi Artikel 9.

## 1.8 Hipotesa

Dalam setiap pengambilan kebijakan, selalu terdapat alasan atau faktor yang mendorong di baliknya. Baik itu faktor dari dalam seperti kondisi psikologis maupun eksternal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan seterusnya. Tidak terkecuali keputusan kebijakan luar negeri. Sebagai pihak berwenang yang bertanggung jawab akan arah sikap negara terhadap dinamika dunia Internasional, seorang Pengambil Kebijakan diharapkan untuk memiliki cara pandang yang netral, terlepas dari segala perspektif pribadi dan condong terhadap kebaikan negara. Namun kenyataannya, perspektif, nilai dan prinsip pribadi yang dianut oleh individu-individu pemegang kekuasaan dalam penentuan kebijakan tersebut tidak bisa dipisahkan dari segala kancahnya di dunia perpolitikan. Hal ini pula yang mempengaruhi Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang dalam melakukan reinterpretasi terhadap artikel 9 konstitusi Jepang. Paham yang ditanamkan oleh kakeknya, Nobusuke Kishi (menjabat Perdana Menteri Jepang pada tahun 1957-1960) bahwa penting bagi Jepang untuk memiliki kekuatan militer sendiri membentuk sistem kepercayaan berisi fakta bahwa memang Jepang dibayangi bayangi ketidakstabilan keamanan regional Asia Timur pasca Perang Dingin, dan nilai yang dianutnya bahwa Jepang seharusnya juga memiliki militer untuk meminimalkan provokasi negara tetangga, mengkonstruksi persepsi akan kenyataan di mana kawasan Asia Timur adalah ancaman, dan pada akhirnya membuatnya memutuskan untuk melakukan reinterpretasi Artikel 9.

## **1.9 Struktur Penulisan**

Struktur penulisan di dalam penelitian ini terbagi dalam 4 bab, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi pemikiran, metodologi penelitian, hipotesa dan struktur penulisan.

### **Bab II Reinterpretasi dan Konsekuensinya terhadap Dinamika Keamanan di Asia Timur**

Pada bab ini akan dibahas biografi Shinzo Abe secara singkat, sejarah Artikel 9, proses hingga terjadinya reinterpretasi Artikel 9, dan kemudian membahas dinamika keamanan di Asia Timur.

### **Bab III Persepsi Shinzo Abe**

Pada bab ini berisi analisa karakter Shinzo Abe dalam mengambil keputusan melakukan reinterpretasi Artikel 9.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab terakhir berisi kesimpulan atas penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya dari penulis.

***Tabel Struktur Penulisan***

<b>BAB</b>	<b>ISI BAB</b>
<b>Bab I : Pendahuluan</b>	1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Praktis 1.4.2 Manfaat Akademis 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Kerangka Pemikiran 1.6.1 Teori Persepsi Ole R. Holsti 1.7 Metodologi Penelitian 1.7.1 Tipe Penelitian 1.7.2 Level Analisa 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian a. Batasan Waktu b. Batasan Materi 1.8 Hipotesa 1.9 Struktur Penulisan
<b>Bab II : Reinterpretasi</b>  <b>Artikel 9 dan</b>  <b>Konsekuensinya terhadap</b>  <b>Dinamika Keamanan di Asia</b>  <b>Timur</b>	2.1 Latar Belakang Shinzo Abe 2.2 Sejarah Artikel 9 2.2 Reinterpretasi Artikel 9 2.3 Dinamika Keamanan Asia Timur

<p><b>Bab III : Persepsi Shinzo Abe</b></p>	<p>3.1 Dinamika Keamanan di Asia Timur</p> <p>3.1.1 Evaluasi Shinzo Abe terhadap Dinamika Asia Timur</p> <p>3.2 Persepsi Ancaman Shinzo Abe Terhadap Dinamika Keamanan di Asia Timur</p> <p>3.2.1 Pandangan Shinzo Abe tentang Agresifitas Negara-negara Asia Timur</p> <p>3.2.2 Pandangan Shinzo Abe mengenai Potensi Peningkatan Agresifitas Negara-negara Asia Timur</p> <p>3.2.3 Pandangan Shinzo Abe tentang Situasi yang Dihadapi oleh Jepang</p> <p>3.3 Persepsi Shinzo Abe tentang Prinsip Politik yang Harus Dianut</p>
<p><b>Bab IV : Penutup</b></p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>